

**RUMUSAN**  
**LOKAKARYA PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**  
**RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018**  
***SAMARINDA, 13 FEBRUARI 2014***

Integrasi perencanaan antara aspek sektoral dan kewilayahan merupakan salah satu bagian dari isu utama Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pembangunan dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sinergitas dimaksud sekurang-kurangnya harus dibuat dari mulai sasaran pembangunan hingga program pembangunan. Analisis dan perumusan kebijakan dalam RPJMD harus dapat memadukan aspek sektoral dan kewilayahan. Sasaran pembangunan jangka menengah yang sifatnya sektoral harus didukung analisis teknokratik berdimensi kewilayahan dengan memerhatikan aspek geografi, demografi, capaian kinerja makro pembangunan, dan aspek-aspek terpenting lainnya.

Dimensi kewilayahan dalam dokumen RPJMD telah diawali dari penjabaran kinerja sektoral dalam 5 (lima) tahun terakhir secara kewilayahan dianalisis pada bab II. Permasalahan kewilayahan dijabarkan di bab IV. Untuk sasaran RPJMD di bab V diupayakan agar dapat dijabarkan target-targetnya kepada kabupaten/kota, sekurang-kurangnya untuk target indikator pembangunan makro RPJMD untuk periode 2014-2018. Selanjutnya, untuk mencapai sinergitas aspek kewilayahan, skenario pembangunan selama lima tahun ke depan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan di bab VI juga akan dipetakan aspek kewilayahannya.

Untuk itu, dalam rangka penyempurnaan rumusan kebijakan pembangunan kewilayahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, dibutuhkan data/informasi dan masukan dari Kabupaten/kota, sebagai berikut :

1. Target pertumbuhan ekonomi, IPM, angka kemiskinan, dan pengangguran untuk masing-masing tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018;
2. Komoditi utama, strategi, dan arah kebijakan untuk masing-masing kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Kaltim;

Sebagai tindak lanjut dari lokakarya yang diselenggarakan pada hari ini, sinkronisasi data dan informasi di atas, BAPPEDA Provinsi Kaltim akan membuat desk khusus untuk koordinasi dengan Bappeda kabupaten/kota pada sekitar minggu III dan IV Februari 2014.

Khusus untuk SKPD Provinsi Kalimantan Timur, agar dalam penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD melakukan koordinasi dengan SKPD teknis Kabupaten/kota untuk memenuhi aspek kewilayahan dalam perumusan kebijakan dan program/kegiatan prioritas.

Samarinda, 13 Februari 2014

**Kepala Bappeda Provinsi Kaltim**